

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika dilihat secara kasat mata, pembangunan di negara sedang berkembang mengalami banyak kegagalan dibanding negara-negara maju. Banyak ahli mencoba menganalisis apa yang menyebabkan pembangunan negara Dunia Ketiga jauh dari kata berhasil dibandingkan negara maju. Dunia Ketiga menurut BC Smith adalah kelompok negara yang memiliki sejarah kolonial, dan dalam proses pembangunan ekonomi dan sosialnya ditandai dengan pendapatan perkapita yang rendah, ketergantungan pada sektor pertanian, kelemahan dalam hubungan perdagangan internasional, deprivasi sosial yang luas di masyarakat, dan terbatasnya kebebasan politik dan sipil. Ada lebih dari 100 negara yang termasuk negara sedang berkembang tersebar di berbagai benua, seperti Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah.¹

Menurut teori pembangunan modernis maupun dependensia penyebab kegagalan pembangunan di Dunia Ketiga berbeda-beda. Namun pada intinya, perdebatan kedua teori pembangunan konvensional ini terpusat pada bagaimana pembangunan ekonomi dan produksi seharusnya dijalankan di negara Dunia Ketiga agar bisa mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju. Namun kedua teori tersebut tidak melihat faktor kemanusiaan, dimana pada tingkat yang paling rendah sekalipun, masyarakat berperan penting dalam pembangunan negara. Model pembangunan konvensional ini tidak pernah mengajarkan bagaimana membangun

¹ B.C.Smith, *Understanding Third World Politics: Theories of Political Changes and Development*, Pallgrave Macmillan, New York, 2003, hlm.14

komunitas. Pembangunan model ini pada akhirnya menghancurkan dan mengungkung potensi kreativitas masyarakat. Misalnya saja apa yang dilakukan korporasi-korporasi di Dunia Ketiga. Mereka menghasilkan sampah beracun, menindas para buruh, dan mengancam eksistensi masyarakat adat.² Kedua pendekatan tersebut sepertinya mengabaikan faktor sosial dan kearifan lokal serta warisan kekayaan alam di suatu negara.

David Korten mengungkapkan, Dunia Ketiga jelas memerlukan suatu transformasi dalam pembangunan daripada bergulat dengan teori konvensional. Di dalam transformasi pembangunan diperlukan kekuasaan yang benar-benar di tangan rakyat, salah satu cara memperkuat rakyat yakni melalui organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization), atau sekarang lebih dikenal dengan nama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Fenomena LSM ini merupakan gejala baru yang masih sedikit dibicarakan, meski sudah menjadi kekuatan dunia.³ Menurut Salamon dan Anheier (1994), definisi LSM yakni sebuah organisasi yang memiliki enam atribut/sifat : 1. Non-pemerintah, 2. Non-profit, 3. Bersifat kesukarelaan, 4. solid dan berkelanjutan, 5. Altruistik, 6. Dermawan.

Maksud dari non-pemerintah disini adalah LSM harus membuat keputusan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Syarat kedua yakni non-profit, maksudnya dalam melaksanakan kegiatan, LSM tidak boleh memuat unsur keuntungan

²Anita Roddick, *Business As Unusual*, terjemahan oleh Lily Yulianti Farid, Gramedia, Jakarta, 2013, hlm. 9.

³David C. Korten, *Menuju Abad 21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, terjemahan oleh Lilian Tejasudhana, YOI, Jakarta, 2001, hlm. xvii.

dalam motifnya dan apapun keuntungan (profit) yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut tidak boleh dibagikan kepada anggota-anggotanya untuk kepentingan pribadi. Syarat yang ketiga, bahwa LSM bersifat kesukarelaan, yang berarti dalam merekrut anggota haruslah benar-benar karena keinginan pribadi masing-masing untuk berpartisipasi, bukan paksaan. Syarat selanjutnya, solid dan berkelanjutan yakni LSM harus berbeda dari kegiatan kesukarelaan lainnya yang bersifat sementara, tetapi LSM harus menjadi entitas yang terus menerus ada dengan bentuk keorganisasian yang solid. Syarat kelima, altruistik, adalah tujuan LSM semata-mata untuk bergerak demi kepentingan orang lain atau masyarakat umum. Terakhir, dermawan, maksudnya LSM tidak mempunyai prospek dalam mendapatkan pembayaran dari penerima bantuan kegiatan, malah LSM diharuskan menggalang dana untuk kegiatan mereka dari sumber-sumber lain.⁴

Kebangkitan LSM-LSM ini bisa membawa perubahan dalam banyak hal. LSM yang bekerja di isu lingkungan saja setidaknya berjumlah sekitar 100.000 LSM di seluruh dunia. Banyak diantara mereka yang mengalami tekanan dalam menjalankan kegiatan, banyak juga LSM yang begitu kuat. Kemampuan LSM dalam mewakili jutaan orang yang tidak mempunyai kekuatan dan mengawasi jalannya pemerintahan dunia ini menjadi hal yang tidak mungkin bisa diremehkan.⁵ Kedekatan LSM dengan masyarakat memang tidak bisa dipungkiri. Mereka melihat langsung bagaimana masyarakat mengalami penderitaan akibat kemiskinan, kelaparan, maupun tindak kekerasan.

⁴ Shinichi Shigetomi, *The State and NGOs: perspective from Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2002, hlm. 3

⁵ Anita Roddick, *op.cit.*, hlm 7

Mereka hidup menyelami masyarakat. Banyak dari LSM ini sudah hidup bertahun-tahun mendampingi kaum terpinggirkan. Hal inilah yang membuat peran LSM penting dalam pembangunan. Meskipun antara satu LSM dengan yang lainnya mempunyai visi, misi, target, dan model pendekatan yang berbeda-beda tergantung lingkungan negara di mana mereka berada, namun LSM yang tergabung dalam organisasi internasional mempunyai *keyword* yang sama dalam hal partisipasi, pembangunan komunitas, pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan, dan wanita.⁶ Dari persamaan hal-hal yang menjadi perhatian LSM-LSM tersebut, mereka biasanya merancang program-program yang dikaitkan dengan komunitas lokal di suatu negara, dalam hal ini masyarakat benar-benar dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu perhatian utama LSM-LSM dalam gerakannya yakni melawan kemiskinan. Semenjak tahun 1980-an ada tiga krisis global yang mengancam kehidupan umat manusia yaitu kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan tindak kekerasan sosial. Pendekatan-pendekatan pembangunan di masa lalu, dalam banyak hal malah menambah parah ketiga krisis tersebut. Tidak mengherankan jika di abad 21 ini kemiskinan menjadi suatu mimpi buruk global.⁷ Pertumbuhan penduduk di negara-negara sedang berkembang yang rata-rata sebesar 2,5 persen per tahun mutlak menjadikan orang yang hidup dibawah garis kemiskinan pada tahun 1980 lebih banyak dibanding tahun 1960. Seperti halnya orang-orang miskin yang biasanya paling akhir menikmati perkembangan ekonomi, negara-negara Dunia Ketiga juga umumnya

⁶ Shinici Shigetomi, *op.cit.*, hlm 2

⁷ David C. Korten, *op.cit.*, hlm. 19

menanggung beban terburuk akibat kemerosotan ekonomi.⁸ Di abad sekarang, pengentasan kemiskinan menjadi agenda internasional yang dilakukan oleh banyak aktor baik individu-individu, komunitas lokal, organisasi internasional, LSM, dan pemerintah.

LSM sebagai salah satu aktor dalam melawan kemiskinan tentunya memiliki upaya-upaya yang beragam, salah satunya dengan Perlindungan Sosial (Social Protection). Menurut Bank Dunia, Perlindungan Sosial (SP), secara umum didefinisikan sebagai langkah-langkah umum untuk memberikan jaminan pendapatan bagi individu, sejalan dengan agenda internasional dalam mengurangi kemiskinan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mendefinisikan SP sebagai hak asasi manusia. Pendekatan yang berbasis pemenuhan hak menganggap warga negara sebagai *Pemegang hak* dan negara-negara sebagai *Penanggungjawab dalam pemenuhan hak*. Dalam konteks ini, SP dapat dilihat sebagai pembangunan sosial seperti kesetaraan, inklusi dan non-diskriminasi.

SP sendiri telah mendapatkan respon yang positif dari banyak negara penerima. Pemerintah Zambia misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berarti dan berkelanjutan dapat dicapai tanpa adanya Perlindungan Sosial. Keuntungan dari mekanisme SP dalam memberikan jaminan sosial tanpa meredam pertumbuhan ekonomi dianggap sangat penting bagi agen-agen pembangunan di sejumlah negara-negara berkembang.⁹

⁸ Ibid., hlm. 21

⁹ Paolo Brunori, "Social Protection for Development: A Review of Definitions", *European Report on Development*, 2010, 3.

Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) merupakan LSM yang didirikan di Inggris pada tahun 1942. Oxfam merupakan salah satu LSM yang dikenal dengan program-program pembangunan, kesetaraan gender, terutama perhatiannya dalam melawan kemiskinan. Oxfam GB (Great Britain) sejak tahun 1963 membantu Pemerintah Kenya saat negara ini baru merdeka dari jajahan Inggris. Kenya merupakan negara yang dianugerahi keindahan alam dan keanekaragaman budaya. Negara ini dianggap eksotis bagi wisatawan asing yang ingin menikmati keindahan padang rumput, pegunungan, pantai, maupun wisata satwa liarnya. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, negara ini dianggap yang terbesar diantara negara-negara Afrika lainnya. Pada tahun 1963, pendapatan kotor nasional (GNI) Kenya per kapita mencapai sekitar US\$100. Pada 2012, angka itu diperkirakan mencapai US\$850. Suatu negara dikategorikan berpenghasilan menengah menurut Bank Dunia ketika GNI per kapita mereka melampaui US\$1.036.¹⁰ Hal ini membuat Kenya sangat ambisius untuk mencapai target menjadi *middle-income country* pada 2030.

Meski begitu, Kenya menghadapi sejumlah persoalan serius, yakni kurangnya perdamaian dan keamanan, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, kekeringan berulang yang dapat menyebabkan jutaan warga negara Kenya berisiko kelaparan, dan belum lagi masalah korupsi yang menggerogoti pejabat Kenya.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Kenya diprediksi membuat negara ini tidak bisa mencapai Millenium Development Goals (MDGs) untuk mengurangi separuh

¹⁰ Claire Provost, "How has Kenya changed since independence?", The Guardian, diakses dari <http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2013/dec/12/kenya-how-changed-independence-data>, pada tanggal 29 september 2014

kemiskinan pada 2015. Data terbaru menunjukkan sekitar 45% dari penduduk hidup dengan kurang dari US\$ 1,25 per hari, dan lebih dari 65% kurang dari US\$ 2. Pada tahun 2005, penduduk yang hidup berpenghasilan kurang dari US\$ 1,25 nyaris mencapai separuh populasi, sangat tinggi dibanding tingkat kemiskinan pada awal tahun 1990-an. Bank Dunia mengatakan kemiskinan di Kenya sangat ekstrim di mana empat dari sepuluh warga Kenya atau setidaknya 30% dari populasi berpenghasilan kurang dari US\$ 1. Sementara menurut jajak pendapat HDI (Human Development Index) oleh UNDP (United Nations Development Programme), Kenya menduduki peringkat 145 dari 187 negara.¹¹ Kesenjangan antara kaum kaya dan miskin di negara ini juga sangat timpang, saat ini, 10 persen orang-orang terkaya dari populasi Kenya mengendalikan hampir setengah dari kekayaan bangsa sedangkan 10 persen orang-orang miskin memiliki kurang dari 1 persen.

Salah satu penyebab kemiskinan di Kenya karena keanekaragaman ekonomi yang hanya terbatas pada pariwisata, hortikultura, dan jasa. Sekitar tiga perempat dari populasi Kenya tergantung pada industri pertanian, tetapi dengan pola cuaca yang tidak menentu dan sebagian besar daerah berupa padang pasir gersang, pertanian adalah sektor yang sangat tidak stabil. Periode kekeringan dapat melumpuhkan, bukan hanya dalam hal penyediaan pangan, tetapi dalam pekerjaan juga. Bahkan ketika panen sudah cukup, kebijakan pemerintah yang buruk menghambat pertumbuhan sektor pertanian. Padahal Kenya merupakan salah satu negara terbesar di Afrika yang mengekspor teh,

¹¹ Joseph Masha, "Study: Kenya fares badly in human development", Standard Media, diakses dari <http://www.standardmedia.co.ke/?articleID=2000085846>, pada tanggal 21 September 2014

kopi, dan produk hortikultura ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kegagalan pemerintah dalam meningkatkan investasi asing membuat lapangan pekerjaan di Kenya menjadi semakin langka. Untuk memulai usaha kecil pun ada beberapa hambatan bagi masyarakat Kenya, termasuk masalah kredit mikro.

Selain masalah kemiskinan, menurut Transparency International, Kenya adalah salah satu negara paling korup di dunia, berada di urutan 157 dari 180 negara pada tahun 2007.¹² Sulit bagi mayoritas penduduk untuk melarikan diri dari kemiskinan di Kenya, ketika uang pemerintah digunakan dengan tidak semestinya. Suap, penipuan dan sikap loyalitas pada suku tertentu yang umum terjadi di dalam semua tingkat pemerintahan menghambat setiap upaya untuk memberantas korupsi yang merajalela di seluruh negeri.

Sikap loyalitas etnis di Kenya sudah melekat dalam kehidupan sosial dan politik Kenya sejak kemerdekaan. Partai-partai politik yang terbentuk di Kenya berdasarkan identitas suku. Distrik-distrik (county) yang selayaknya menjadi unit utama pembangunan di Kenya, merupakan cerminan komposisi etnis dari provinsi mereka. Proyek-proyek pembangunan digunakan untuk mempromosikan kepentingan kelompok etnis yang kuat di banyak distrik sehingga seringkali menciptakan permusuhan dan kebencian antar etnis.¹³ Penduduk Kenya meyakini bahwa inilah realita yang terjadi di Kenya sejak kemerdekaan. Selain masalah ketidaksetaraan pembangunan, loyalitas etnis menjadi penyebab meletusnya konflik kekerasan pada pemilu-pemilu di Kenya,

¹² Transparency International, diakses dari www.transparency.org, pada tanggal 29 September 2014

¹³“Kenya-Recent Developments and Challenges”, Cultural Survival, diakses dari <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/kenya/kenya-recent-developments>, pada tanggal 21 September 2014

termasuk pemilu tahun 2007 yang menyebabkan kondisi politik dan ekonomi Kenya memburuk.

Akibatnya, sektor pendidikan, kesetaraan gender, upaya pengurangan penyebaran HIV (human immunodeficiency virus) / AIDS (acquired immune deficiency syndrome), kepedulian terhadap lingkungan, dan bidang kesehatan semua tidak menunjukkan perkembangan yang positif. Pendidikan dasar gratis yang mulai berlaku pada tahun 2003, menargetkan 1,5 juta anak kembali ke sekolah. Namun, sekolah-sekolah masih kekurangan dana, kekurangan bahan ajar, dan tenaga pendidik masih sangat terbatas. Alhasil, setidaknya 1,7 juta anak di Kenya tidak dapat mengenyam bangku sekolah, terutama anak-anak jalanan dan mereka yang tinggal di daerah kumuh. Di bidang kesehatan, kematian anak naik dari 9 persen pada tahun 1990 menjadi 11,5 persen pada tahun 2003, sementara penyebaran virus HIV / AIDS naik dua kali lipat dari 5,1 persen pada tahun 1990 menjadi 10,6 persen pada tahun 2002. Lebih dari 100.000 anak-anak hidup dengan virus, sementara 650.000 anak menjadi yatim piatu akibat orangtua mereka yang meninggal akibat terinfeksi HIV/AIDS.¹⁴ Anggaran belanja pemerintah untuk kesehatan masih rendah, yakni kurang dari 6% dari belanja nasional pada tahun 2011, dibandingkan dengan Tanzania yang mencapai 11%.

Pada bulan Januari 2009, Pemerintah Kenya menyatakan krisis pangan di negara ini menjadi bencana nasional. Krisis pangan memang menjadi momok yang melanda benua Afrika selama 30 tahun terakhir. Krisis pangan ini disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor, namun, semua itu didahului oleh gagalnya panen akibat cuaca

¹⁴“Child and Maternal Health Opportunities in Kenya”, FSD International, diakses dari <http://www.fsdinternational.org/country/kenya/healthopps>, pada tanggal 10 September 2014

ekstrim yang menyebabkan kekurangan makanan. Jutaan orang terkena dampak malnutrisi dan ribuan meninggal karena kelaparan meskipun upaya bantuan telah dilakukan oleh masyarakat internasional.¹⁵

Menurut statistik pemerintah, diperkirakan 9,5 juta orang beresiko kelaparan, dengan 4,1 juta diantaranya tinggal di permukiman kumuh perkotaan.¹⁶ Mayoritas masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di daerah kumuh ini diselimuti oleh tingginya tingkat kejahatan, kerawanan pangan dan keputusasaan. Bahkan, salah satu daerah kumuh terbesar di Afrika, Kibera, terletak di ibukota Kenya, Nairobi. Oxfam, Care International (Kenya), dan Concern Worldwide ditugaskan melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ada krisis kemanusiaan berlangsung di daerah kumuh Nairobi, di mana para keluarga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka.

Kenya merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia. Seperti banyak negara sedang berkembang lainnya, Kenya terus mengalami pertumbuhan urbanisasi yang cepat. Pada tahun 1990, 24% populasi di Kenya tinggal di daerah perkotaan, tetapi pada tahun 2000, angka tersebut telah meningkat menjadi 33%, bahkan di Nairobi tumbuh lebih dari 7 persen per tahun.¹⁷ Tingkat kemiskinan tertinggi berada di distrik pastoralist Utara dengan lebih dari setengah dari penduduk Nairobi tinggal di daerah kumuh dengan akses yang sangat terbatas terhadap pelayanan publik,

¹⁵“Food Crises in Africa in the Last 30 Years”, Harvest Help, diakses dari <http://www.harvesthelp.org.uk/>, pada tanggal 10 September 2014

¹⁶ Claire Harvey, “Cash Transfers in Nairobi’s Slums”, *Oxfam*, 2012, 3.

¹⁷ Annabelle S. Erulkar, “Adolescence in the Kibera Slums Of Nairobi, Kenya”, *Population Council*, 2007, 9.

termasuk air bersih dan sanitasi. Sebagian besar masyarakat miskin perkotaan tinggal di permukiman ilegal, dengan sekitar 2 juta orang tinggal di daerah kumuh Nairobi. Sekitar 60% dari populasi Nairobi tinggal di daerah kumuh yang menempati hanya 5% dari lahan kota. Penghuni kawasan kumuh ini umumnya banyak dilupakan, dengan rumah-rumah mereka yang terbuat dari limbah kertas nilon, kotak karton atau lumpur, atau yang paling mewah terbuat dari lembaran-lembaran besi.

Di Kenya, kebanyakan orang tunawisma adalah orang-orang yang bermigrasi dari daerah pedesaan untuk mencari peluang yang lebih baik di kota. Orang-orang ini akhirnya mencari tempat termurah untuk tinggal, berharap mendapatkan pekerjaan yang layak, dan satu-satunya pilihan adalah tinggal di permukiman kumuh. Sebagian besar pekerjaan yang tersedia di Kenya yang ditawarkan berjenis informal dengan upah yang sangat kecil. Demi hidup terjangkau, banyak yang memilih untuk membangun kehidupan mereka di permukiman kumuh dan rela berjalan bermil-mil ke Kawasan Industri Nairobi (Nairobi Industrial Area). Mereka yang beruntung mungkin bisa diserap dengan kontrak jangka pendek yang sering berlangsung kurang dari tiga bulan. Ironisnya, setiap daerah kumuh di Nairobi bertetangga dengan orang-orang kaya di pinggiran kota. Para wanita dari daerah kumuh sering pergi ke pinggiran kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan sebagai buruh cuci pakaian atau sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di siang hari sebelum kembali ke rumah mereka di malam hari.

Banyak wanita berwirausaha dalam skala usaha kecil seperti menjual sayuran dan menjajakan dagangannya. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari populasi di daerah

kumuh yang mencari nafkah melalui upaya yang layak tersebut. Banyak yang lebih suka menjual minuman keras ilegal, yang lebih menguntungkan mengingat sejumlah besar penghuni kawasan kumuh gemar minum-minuman keras. Banyak dari mereka beralih ke prostitusi, yang memainkan peran besar dalam penyebaran HIV. Anak-anak jalanan sudah menjadi pemandangan umum di daerah kumuh, mereka sering mengais-ngais makanan dan sampah dari bahan-bahan daur ulang kemudian dijual kepada tengkulak dengan harga yang tidak seberapa. Beberapa anak-anak jalanan ini tumbuh menjadi penjahat-penjahat, bahkan kebanyakan pelaku perampokan bersenjata di negara ini berasal dari daerah kumuh. Kelompok lain yang menonjol dari populasi kumuh adalah anak-anak yatim, yang sebagian besar telah kehilangan orang tua mereka akibat terinfeksi HIV / AIDS. Anak-anak seperti mereka tidak mengenal kehidupan lain, tidak bersekolah dan akhirnya hidup dalam keputusasaan.¹⁸

Sebagai bagian dari program terkoordinasi di Nairobi, Oxfam GB dan Concern Worldwide mengembangkan program bersama yang disebut Nairobi Urban Social Protection Programme (Program Perlindungan Sosial Perkotaan Nairobi) untuk mengatasi krisis perkotaan ini. Tujuan keseluruhan program ini untuk meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian sebagian besar rumah tangga rawan pangan di permukiman kumuh Nairobi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses langsung mereka terhadap makanan dan mengembangkan inisiatif jangka panjang untuk meningkatkan akses mereka terhadap pangan dan jaminan penghasilan. Oxfam juga

¹⁸Lilian Maingi, "It's A Slum Life In Nairobi", News from Africa, diakses dari http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/articles/art_11886.html, pada tanggal 29 September 2014

merangkul beberapa komunitas lokal di Nairobi terkait sosialisasi program ke masyarakat agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Program ini mendapatkan respon yang cukup baik, dibuktikan dengan banyaknya dari mereka yang sedikit demi sedikit keluar dari masalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga-keluarga mereka. Monica Akinyi misalnya, tadinya seorang buruh cuci pakaian yang hanya mempunyai penghasilan beberapa *shillings* per hari. Kini, ibu tunggal yang memiliki tiga anak ini mengaku baru pertama kalinya mampu membelikan mainan bagi anak-anaknya berkat program ini. Dia juga memulai usaha kecil-kecilan sebagai *supplier* makanan. “Sedikit demi sedikit program ini meningkatkan standar hidup keluarga saya.”, ujar Monica.¹⁹

B. Rumusan Masalah :

Bagaimana implikasi Program Perlindungan Sosial Perkotaan yang dirancang Oxfam terhadap pembangunan di Nairobi, Kenya?

C. Teori/Kerangka Pemikiran

1. Pembangunan Sosial (Social Development)

Inti dari Pembangunan Sosial adalah inklusi sosial yaitu kesempatan bagi semua warga masyarakat untuk memperoleh hak dan kebutuhan yang paling dasar seperti kebutuhan fisik dan sosial, yakni pangan, pendidikan, pekerjaan, modal (uang tunai), dan kesetaraan gender untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sebagai warga masyarakat. Pembangunan Sosial-Budaya tidak bisa direduksi sebagai “Sektor Pembangunan Sosial-Budaya”, sebab semua bidang kehidupan manusia (termasuk

¹⁹ Sumananjali Mohanty, “Nairobi Urban Social Protection Programme”, *Oxfam*, 2010, 9.

bidang ekonomi, politik, perdagangan, industri, fisik) selalu berdimensi sosial-budaya, artinya mengandung unsur interaksi sosial dan relasi sosial (terutama relasi kekuasaan). Jadi, pembangunan ekonomi tidak boleh menghasilkan interaksi sosial dan hubungan kekuasaan yang bersifat menindas antara golongan yang berkuasa dan yang dikuasai menurunkan kualitas kehidupan sosial.

Banyak konsep pembangunan di negara berkembang menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial dari pembangunan ekonomi. Sektor-sektor yang selama ini dikelompokkan dalam bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi terabaikan dan terkalahkan oleh sektor-sektor dalam kelompok ekonomi. Kebanyakan sistem pembangunan di negara berkembang memisahkan antara kedua sektor tersebut, sehingga ada kesan bahwa sektor-sektor sosial kurang diperhatikan. Padahal terbukti bahwa keberhasilan negara-negara industri baru, terjadi justru karena penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.²⁰

Gagasan pembangunan sosial berbeda dibanding dengan gagasan pembangunan dalam melihat perubahan yang berlangsung di masyarakat. Dalam gagasan pembangunan (*development theory*), terutama yang berasal dari kalangan positivis, pembangunan didefinisikan tak lebih dari adanya pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Parameter pembangunan dari pandangan ini misalnya jumlah GNP dan jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu negara. Dari sinilah kemudian muncul gagasan pembangunan sosial (*social development*) yang merasa bahwa gagasan pembangunan yang selama ini berkembang cenderung mengabaikan persoalan-persoalan sosial seperti

²⁰ Santoso Soeroso, *Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Di Indonesia*, EGC, Jakarta, 2002, hlm.44

kemiskinan dan pengangguran, korupsi, kesenjangan sosial yang lebar dan disintegrasi sosial.

Perbedaan lain dari gagasan pembangunan yang berorientasi ekonomi dengan pembangunan sosial adalah dari sisi aktor yang terlibat dalam proses pembangunan. Pandangan pembangunan ekonomi hanya menempatkan negara sebagai aktor tunggal dan dominan. Sedangkan pandangan pembangunan sosial memberi peluang bagi hadirnya aktor-aktor di luar negara seperti masyarakat sipil atau kalangan LSM/NGO. Pandangan ini merangkul semua pemangku kepentingan baik pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Kapasitas luar biasa yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan suatu negara sangat diperhitungkan oleh konsep pembangunan sosial, terutama dalam penguatan sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta kemampuan LSM-LSM tersebut dalam memobilisasi warga untuk mengusulkan kebijakan pembangunan sosial kepada pemerintah.²¹

Misal dalam konteks urban, dengan penguatan peran pihak yang berwenang, LSM dan organisasi masyarakat, memungkinkan masyarakat menjadi lebih aktif terlibat dalam perencanaan perkotaan, pengembangan kebijakan, dan implementasi.²² Memperkuat kemampuan masyarakat lokal dan komunitas dengan tujuan-tujuan umum untuk mengembangkan organisasi dan sumber daya mereka sendiri dan untuk mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan sosial, termasuk melalui kegiatan LSM, ditegaskan dalam *World Summit for Social Development*, Komitmen 4,

²¹ United Nations, "Report of the World Summit for Social Development", *United Nations*, 1995, 130.

²² *Ibid.*, hlm. 49.

huruf j.²³

Masyarakat miskin di permukiman kumuh Nairobi mengalami krisis hak-hak kebutuhan dasar, utamanya pangan. Mereka tidak mampu membeli makanan yang layak untuk keluarga-keluarga mereka hingga kelaparan, anak-anak mengalami gizi buruk, serta terjangkitnya penyakit akibat lingkungan yang kotor dan kumuh. Kondisi ini sangat ironis jika dibandingkan tetangga-tetangga mereka di pinggiran kota Nairobi merupakan orang-orang yang sangat kaya. Pada hakikatnya pembangunan negara memerlukan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat, agar pembangunan tidak sekedar menjadi proyek, namun menjadi suatu misi yang digalakkan bersama-sama. Bagaimana mungkin pembangunan nasional bisa berhasil jika masyarakatnya saja belum mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sendiri?

2. Pembangunan Sebagai Perdamaian (PSP)

Pembangunan menurut Johan Galtung adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Perdamaian disini tidak harus diartikan secara sempit sebagai resolusi konflik belaka. Tetapi lebih dari itu, perdamaian dalam arti luas merupakan segala prakarsa dan upaya kreatif manusia, termasuk kreatif dalam kebijakan pembangunan, untuk mengatasi dan menghilangkan segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, struktural, kultural maupun personal di masyarakat.²⁴

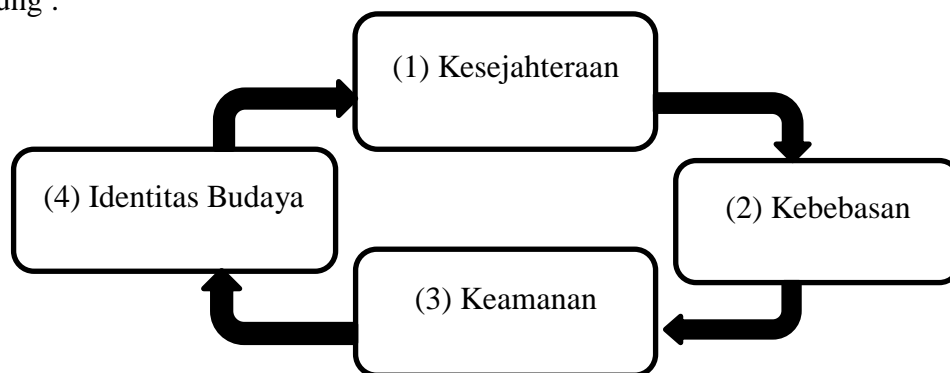
²³ Ibid., hlm. 16

²⁴ Lambang Trijono, *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*, YOI, Jakarta, 2007, hlm. 9

Tiga Asumsi Dasar PSP :

- Pembangunan harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan HAM untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidakamanan dan alienasi budaya.
- Pembangunan dijalankan oleh struktur dan lembaga ekonomi dan politik, negara dan pasar yg tidak saling menekan, sebaliknya membebaskan dan meningkatkan kapasitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk mewujudkan perdamaian.
- Strategi, perencanaan dan kebijakan pembangunan harus peka konflik dan mampu mendorong perdamaian.²⁵

Pembangunan sebagai perdamaian menempatkan kebutuhan dasar manusia secara holistik, berikut ini empat kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi menurut Johan Galtung :



Pembangunan sebagai perdamaian menjadikan ketersediaan dan keterpenuhinya keempat kebutuhan dasar tersebut sebagai prasyarat penting terwujudnya perdamaian di masyarakat. Jika keempat kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan

²⁵ Ibid., hlm. 44

menyebabkan manusia terjebak dalam empat jenis kekerasan, yaitu: (1) kemiskinan, (2) represi, (3) kerusakan, (4) alienasi budaya.

Pembangunan sebagai Perdamaian berusaha menjelaskan bagaimana pembangunan seharusnya membebaskan masyarakatnya dari segala bentuk kekerasan. Pandangan pembangunan ini mempunyai tujuan hakiki dalam menciptakan perdamaian. Meskipun pemerintah dipandang sebagai tonggak penting dalam agen perdamaian, namun peran masyarakat sipil atau LSM menjadi aktor yang membantu dari luar, terutama karena sifat mereka yang dekat dengan masyarakat, namun tetap mempunyai kekuatan secara politik.

Hubungan LSM/masyarakat sipil dengan studi perdamaian kini mempunyai cakupan yang luas dari kegiatan lokal hingga global. Menurut Jake Smith, kegiatan LSM sebagai gerakan transnasional dikelompokkan menjadi enam jenis: (1) mereka menciptakan dan memobilisasi jaringan global; (2) mereka berpartisipasi dalam konferensi organisasi antar-pemerintah; (3) mereka terlibat dalam pertemuan PBB, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi dan Sosial; (4) mereka memfasilitasi agar kerjasama di luar pertemuan ini dan di tempat-tempat seluruh dunia; (5) mereka terlibat dalam kegiatan dalam negara; dan (6) mereka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai cara.²⁶ Secara politik, LSM Internasional bisa menjadi salah satu kekuatan internasional dalam memberikan tekanan kepada suatu negara dalam menjaga perdamaian, dengan kapasitas mereka atas asas netralitas dan kemampuan mereka dalam memberikan bantuan tanpa mendapat kendala dari pemerintah atau badan-badan

²⁶ Johan Galtung dan Charles Weber, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, Routledge, New York, 2007, hlm. 308.

resmi.²⁷

Perekonomian di Kenya memang terus tumbuh, bahkan disebut terbesar diantara negara-negara Afrika lainnya. Namun sayangnya, kehidupan politik dan sosial di Kenya masih carut marut. Korupsi merajalela, kemiskinan dan pengangguran, hingga kelompok-kelompok etnis yang sering bertentangan membuat pembangunan di Kenya berjalan lambat. Partai-partai politik yang ada hanya mewakili golongan-golongan etnis tertentu, sehingga masyarakat Kenya seakan-akan *voiceless*. Masih tingginya tingkat kemiskinan, tekanan politik, dan diskriminasi etnis di Kenya membuktikan bahwa pembangunan di Kenya masih menciptakan kekerasan.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teori diatas, dapat ditarik sebuah jawaban sementara yaitu:

Implikasi Program Perlindungan Sosial Perkotaan yang dirancang oleh Oxfam terhadap pembangunan di Nairobi, Kenya yakni,

- secara sosial, program ini telah menciptakan inklusi sosial berupa pemenuhan hak-hak dasar dalam hal pangan, pendidikan, pekerjaan, modal (uang tunai), dan kesetaraan gender bagi masyarakat di Nairobi, Kenya.

- secara politik, program ini telah mendorong Pemerintah Kenya mengadopsi program serupa bernama Saidia Jamii (Help the Family) / UFSP (Urban Food Subsidy Programme) untuk memberi Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin perkotaan dalam jangka panjang serta mengurangi ketegangan diantara masyarakat Nairobi.

²⁷ Ibid., hlm 374.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi krisis ekonomi sosial politik yang melanda Kenya dan program Oxfam dalam melawan kemiskinan di perkotaan pada tahun 2009-2012. Namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk memuat data dan fakta sebelum atau sesudah tahun tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif yakni menguraikan data-data yang diperoleh sehingga dapat membuktikan kebenaran hipotesa. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel baik dari koran maupun internet dan sumber lain yang dianggap relevan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan bagian yang menjadi dasar dan pendahuluan dalam penyusunan skripsi ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II Problem Etnis dalam Pembangunan di Kenya

Bab ini menguraikan persoalan etnis yang menggerogoti proses pembangunan di Kenya, bagaimana etnis mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas kehidupan politik negara ini, serta dampak kekerasan etnis bagi kehidupan ekonomi Kenya.

BAB III Keterlibatan LSM Internasional dalam Pembangunan di Kenya

Bab ini menguraikan bagaimana lemahnya peran negara Kenya sebagai aktor pembangunan, munculnya LSM sebagai kekuatan baru dalam pembangunan, bagaimana program NUSPP Oxfam dilaksanakan, dan implikasi sosial yang diberikan program ini bagi masyarakat Nairobi.

BAB IV Kontribusi Oxfam dalam Mendorong Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Perkotaan di Kenya

Bab ini menguraikan urgensi kebijakan Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin perkotaan Kenya dan implikasi politik dari program NUSPP berupa pengadopsian program oleh Pemerintah Kenya sebagai kebijakan Perlindungan Sosial.

BAB V Kesimpulan